

Gempa

Aktivitas kawah Gunung Bromo sempat mengalami peningkatan pada 4 Februari 2023 karena teramati sinar api dari dalam kawah berdasarkan pengamatan visual pada 3 Februari 2023 pukul 21.14 WIB.

Bau belerang tercium kuat dari bibir kawah dan terdengar suara gemuruh. Asap kawah dalam satu minggu terakhir teramati berwarna putih tipis hingga tebal dengan ketinggian 50-900 meter dari puncak, serta vegetasi pada dinding kaldera

sebelah Timur berwarna kuning dan mengering akibat paparan asap kawah Gunung Bromo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengimbau warga agar tidak mendekati bibir kawah Gunung Bromo pada radius 1 kilometer menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, pihaknya melakukan beberapa upaya preventif atas kondisi Gunung Api Bromo yang berstatus Level 2.

Keluarga

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUIHP.

Sementara itu, untuk terdakwa Putri Candrawathi, JPU menuntut hukuman delapan tahun penjara. Pasalnya, jaksa meyakini Putri terlibat pembunuhan berencana terhadap Yosua.

Sehubungan hal itu, Majelis hakim menetapkan sidang vonis perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi digelar, Senin (13/2). Majelis hakim menjadwalkan sidang tersebut setelah

melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa.

"Majelis hakim akan mengambil putusan terhadap terdakwa (Putri Candrawathi), yakni pada tanggal 13 Februari 2023," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis lalu.

Pernyataan tersebut ketua majelis hakim sampaikan usai pembacaan duplik oleh penasihat hukum Putri Candrawathi. Sebelumnya pada hari Selasa (31/1),

Sultan HB X

Penetapan Sri Sultan HB X sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut berdasarkan proses penyeleksian yang melibatkan 21 dewan pakar.

Pada Malam Penganugerahan Maritime Award 2022-2023 tersebut, Sultan HB X juga menyampaikan Orasi Kebangsaan tentang Kebijakan Laut dan Kedaulatan Maritim Indonesia.

Sultan menuturkan, untuk mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, upaya revitalisasi semangat Wawasan Nusantara Bahari diperlukan. Selain itu, pemahaman tentang geopolitik dan geostrategi harus dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia patut menaruh perhatian, dengan posisi Indonesia yang memangku Samudera Hindia. Khususnya eksistensi Jalur Sutra Maritim, dimana pada masa perang dingin, Samudera Hindia tidak pernah menjadi daya tarik kepentingan ekonomi dan politik bagi negara-negara tertentu, terutama Amerika, Jepang, China, dan negara-negara Eropa.

Konstelasi mulai berubah pada awal tahun 2000-an, ketika konflik perairan China Selatan mengemuka yang menyebabkan Samudera Hindia muncul ke permukaan sebagai wilayah ekonomi dan politik yang sangat penting. "Merujuk pada berbagai fenomena maritim di atas, tidak berlebihan kiranya apabila kita memang harus menggali, mengkaji serta merevitalisasi kembali Semangat Nusantara. Para penghuni yang berada di dalam Nusantara, harus memiliki Wawasan Nusantara, sekaligus Wawasan Bahari, atau lebih tepatnya Wawasan Nusantara Bahari," ujar Sultan.

Menurut Gubernur DIY, pemahaman geopolitik dan geostrategi dimaksudkan untuk

menggugah wawasan, dalam usaha mengeksplorasi jati diri bangsa. Pemahaman geopolitik dan geostrategi itu, dapat diderivasi dari Wawasan Nusantara, diaktualisasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, serta ditempatkan dalam konteks percaturan global dan pergeseran geopolitik internasional.

Sultan menyatakan, di tengah upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, teriring pula kewajiban nasional untuk memperkuat integrasi bangsa, melalui strategi nasional aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ditekankan, sekalipun bangsa Indonesia satu, tetap tidak boleh dilupakan, sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu kemajemukan.

"Pengalaman mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (tunggal-ika) yang paling potensial untuk bisa melahirkan kesatuan dan persatuan yang kuat. Melainkan pengakuan akan adanya keberagaman (bhinneka), dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Kenyataan kemajemukan inilah, yang seringkali diabaikan dalam wacana politik elite negeri ini," terang Sultan.

Karenanya, sekalipun diakui bangsa Indonesia masyarakat yang bhinneka atau berbeda-beda, menurut Sultan, harus selalu diingatkan bahwa seluruhnya adalah satu (tunggal ika). Jadi sudah seharusnya menjadikan keberagaman sebagai faktor perekat integrasi bangsa, melalui upaya-upaya proaktif dan partisipatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, tentu menjadi relevan, apabila semua pihak melakukan flashback atas upaya peneguhan Wawasan Nusantara Bahari, yang telah dilontarkan dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957.

"Wawasan Nusantara Bahari yang dide-

"Di antaranya penutupan radius 1 kilometer dari bibir kawah untuk kegiatan wisatawan dan perdagangan, melakukan sosialisasi dan kesepakatan bersama dengan pelaku jasa wisata (paguyuban jeep, kuda, dan PKL) terkait larangan untuk kegiatan radius 1 kilometer, sosialisasi kepada para wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas radius 1 kilometer serta pemberian pengumuman kepada pengunjung di tiket masuk Bromo," ucapnya.

(Ant/San)-f

Wahyu juga mengatakan bahwa pembacaan vonis Ferdy Sambo akan berlangsung pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, kedua terdakwa ini akan menjalani sidang vonis pada hari yang sama.

Di sisi lain, Ricky Rizal dan Kuat Mairuf akan menjalani sidang pembacaan vonis pada tanggal 14 Februari 2023. Pembacaan vonis untuk Richard Eliezer atau Bharada E menyusul sehari setelahnya, yakni pada tanggal 15 Februari 2023.

(Full)-f

sain sebagai simbol pemersatu bangsa tetap harus diperjuangkan, meski nasib dari konsep itu belum mengalami kemajuan berarti. Bukan itu saja, nilai ekonomis, strategis, bahkan simbolis dari batas wilayah laut, belum pernah dikembangkan secara sungguh-sungguh," ungkap Sultan.

Sultan menambahkan, diplomasi maritim dan ekonomi merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia yang amat strategis. Terutama jika diperankan dalam pergeseran konstelasi geopolitik internasional masa kini. Wawasan Nusantara Bahari pun telah menjadi isu politik penting, terutama dalam ide pembentukan poros lajur laut, bagi pelayaran internasional melalui perairan Indonesia. Adapun alasan utama diplomasi maritim dinilai bernilai tinggi yakni manfaat wilayah maritim terhadap pembangunan ekonomi. Alasan lainnya urgensi pembaharuan konsep geopolitik dalam Wawasan Nusantara yang tidak dapat dilepaskan dari nilai simbolis wilayah maritim.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan selamat kepada penerima Maritime Award 2022-2023. Dengan adanya penganugerahan tersebut diharapkan bisa muncul gagasan dan inovasi lanjutan serta pengambilan kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi yang baik di bidang kemaritiman, agar aktivitas ekonomi maritim semakin berkembang dan diminati.

"Disertai adanya kepastian hukum dan rasa aman, bagi pengguna laut. Semoga penganugerahan ini, dapat memotivasi insan bahari lainnya untuk mengambil peran, memperkokoh pilar bisnis maritim, pilar industri maritim, serta pilar keamanan dan pertahanan negara di laut," ucap Menteri Mahfud.

(Ria/Ira)-f

Sambungan hal 1

besar dalam menyelamatkan demokrasi bangsa Indonesia. Sudah saatnya, kampus bangun dari lelapnya dan membangun gerakan kesadaran kritis dan edukasi politik kaum cendekiawan yang berasal dari luar jaringan kekuasaan.

Melalui kapasitasnya, tantangan besar kaum cendekiawan adalah mengontrol roda demokrasi di Indonesia. Kontrol cendekiawan terhadap kekuasaan idealnya dari posisi luar dari jaringan kekuasaan. Saat mengambil posisi jarak dengan kekuasaan, maka kaum cendekiawan akan bisa tegak berdiri pada titik kebenaran, keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Keberanian cendekiawan saat ini sedang ditunggu dan menjadi tantangan yang dibutuhkan dalam mengontrol kekuasaan supaya kembali ke jalan yang benar. Serta mengembalikan marwah kaum cendekiawan sebagai guru bangsa yang layak didengarkan petuahny.

(Penulis adalah pemerhati kebijakan pendidikan dan Dosen Pascasarjana FKIP UNS Surakarta)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

TRADISI WETONAN CETHIK GENI: Warga menari saat prosesi sakralisasi Tradisi Wetonan Cethik Geni di Gatak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (12/2/2023). Tradisi Wetonan Cethik Geni merupakan ritual turun-temurun sebagai wujud syukur penanda lahirnya lumpia duleg yang merupakan makanan khas buatan masyarakat setempat serta menjadi sumber kehidupan ekonomi warga.

Pilot

Atas permintaan Bupati Nduga, kata Sembiring, aparat keamanan membantu mengevakuasi warga, terutama anak-anak, wanita dan orang sakit dengan menggunakan helikopter milik TNI-Polri. "Evakuasi dilakukan di sekitar Gunung Wea dan kini mereka sudah berada di Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga," ungkapnya.

pimpinan Egianus Kogoya, Selasa (8/2) membakar pesawat milik Susi Air saat mendarat di lapangan terbang Paro. Korem 172/PWY membawahi delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nduga.

(Ant/Has)-f

RUU

rentan dengan kasus-kasus yang mereka hadapi dan adukan ke Komnas HAM," ujarnya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD pada Minggu pagi melakukan jalan sehat membawa serbet di area *car free day* (CFD) Sudirman, Jakarta untuk mendukung pengesahan RUU PPRT. Dalam unggahan di akun Instagram resmi @mohmahfudmd, Mahfud mengaku kedatangannya dalam jalan sehat tersebut demi memenuhi undangan dari Komnas HAM. "Jalan sehat ini sebagai wujud dukungan atas upaya para pejuang hukum, pejuang HAM dan demokrasi, yang sudah 19 tahun lamanya memperjuangkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," tulis Mahfud.

membawa serbet sebagai simbol dukungan bagi para PRT. Mahfud menegaskan, pengesahan RUU PPRT perlu dipercepat agar para pekerja rumah tangga dapat terhindar dari berbagai tindakan kekerasan dan mendapatkan perlindungan.

Menko Polhukam menegaskan, RUU yang sudah dibahas di DPR tersebut telah mendapatkan dukungan secara terbuka dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Komnas HAM telah melakukan kajian terkait pentingnya UU tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan Komnas HAM juga berharap dengan dipercepat UU PPRT ini ada perubahan situasi hak asasi di Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

(Ant/Obj)-f

Jika

Publik keberatan, sehingga muncul wacana penghapusan catering. Ada juga yang mengusulkan perjalanan haji dikurangi dari 40 hari menjadi 35 hari. Menurut Ismed, berdasarkan informasi yang diterima ada 62 ribu orang jemaah haji lanjut usia (lansia) yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara total kuota haji Indonesia tahun ini 221 ribu orang, 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus.

la mengatakan, jika memang jemaah haji lansia atau berisiko tinggi kesulitan untuk mengakses makanan, tinggal dibuat skala prioritas dan dicarikan solusinya. "Mereka (jemaah haji yang tidak lansia) diberikan uang saku dalam pengertian uang maknanya diganti dengan nilai rupiah yang sesuai dengan berapa harga makanan di Arab Saudi," ujar Ismed.

Ismed menambahkan, harga-harga lain yang terlalu tinggi mohon dibahas kembali oleh DPR, agar harga yang terlalu tinggi itu tidak memberatkan calon jemaah haji. Usulan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dari Kemenag juga terlalu kecil. Ia juga berharap ada pengurang-

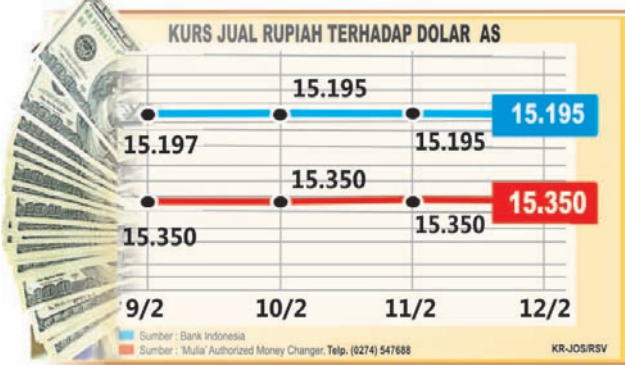
an lama waktu jemaah haji di Arab Saudi dan Indonesia bisa mendapat tambahan bandara untuk kepulangan dari Arab Saudi.

Mengenai jemaah haji ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina), Ismed mengatakan, sebenarnya banyak yang menyediakan makanan. Umumnya pedagang makanan ada di Makkah dan Madinah. Jadi ketika di Armina, petugas haji bisa membantu je-

maah haji untuk menyediakan makanan.

"Petugas haji bisa diberdayakan untuk membantu mencari makanan, karena tidak lama jemaah di Arafah, hanya sekian waktu, di Mina juga begitu, sehingga menurut hemat saya kalau niat itu ada, saya kira ikhtiar bisa dilakukan jadi kita tidak berbicara masalahnya dulu tapi bagaimana solusinya kalau misalkan tidak ada catering," ujarnya.

(Ati)-f



Prakiraan Cuaca				Senin, 13 Februari 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				23-31	70-95
Sleman				23-30	75-95
Wates				23-31	70-95
Wonosari				23-30	70-95
Yogyakarta				23-31	70-95
Cerah Berawan Udara Kabin Hujan Lokal Hujan Petir				Grafis : Anko	

Masyarakat Peduli Data di Pangkalan Data Dikti (PDDikti)



Muhammad Rudyanto Arief
Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta

PEMBACA yang Baik, tulisan saya kali ini mengajak pembaca untuk peduli terhadap data mahasiswa di PDDikti. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau disingkat PDDikti adalah sebuah pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) yang merupakan kumpulan data

penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang sudah terintegrasi secara nasional. Pusat data ini dapat diakses secara publik melalui halaman web pddikti.kemdikbud.go.id. Data yang ada merupakan hasil sinkronisasi yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi nasional. Data yang tercantum dalam PDDIKTI merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Pangkalan data ini menjadi salah satu instrumen pelaksanaan penjaminan mutu. Pada pusat data ini terdapat data seluruh Perguruan Tinggi resmi yang ada di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Kementerian/Lembaga Lain dan Agama.

Mengapa data di PDDikti ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh masyarakat? Masyarakat yang dimaksud siapa saja? Data PDDikti menjadi penting karena data

transaksi mahasiswa mulai dari awal kuliah sampai mahasiswa dinyatakan lulus dari sebuah Perguruan Tinggi akan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi tersebut ke pemerintah melalui Pangkalan Data terpusat yaitu PDDikti. Selain data-data transaksi Mahasiswa seperti profil mahasiswa, status (lulus/ DO), rekam jejak kegiatan mahasiswa tiap semesternya, maka data di PDDikti juga menyimpan data Perguruan Tinggi (profil, rasio dosen terhadap mahasiswa, dan lain-lain), data-data dosen (profil dosen, rekam jejak kegiatan akademik dosen, status dosen, dan lain-lain). Masyarakat yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data di PDDikti, yaitu Orang Tua Mahasiswa, Perusahaan pengguna calon alumni dari sebuah Perguruan Tinggi, Mahasiswa yang sedang berproses kuliah di sebuah Perguruan Tinggi.

Berikut adalah ilustrasi kebutuhan masing-masing Masyarakat di

atas terkait data-data yang dibutuhkan di PDDikti:

- Mahasiswa. Mahasiswa perlu memperhatikan data-datanya di PDDikti pusat melalui halaman web PDDikti untuk memastikan apakah Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa tadi sedang menempuh perkuliahan sudah melaporkan aktivitas perkuliahan Mahasiswa tersebut ke Pemerintah secara tertib tiap semester atau tidak. Sehingga jika data akademik Mahasiswa tersebut belum terdapat di PDDikti maka Mahasiswa segera melaporkan ke Perguruan Tingginya agar segera dilaporkan ke PDDikti tingkat Nasional. Tiap semester Perguruan Tinggi wajib melaporkan data transaksi akademik Mahasiswa aktifnya ke Pemerintah melalui PDDikti. Jika data ini tidak tertib di laporan akan berpotensi Mahasiswa ketika lulus nanti akan kesulitan untuk diterbitkan nomor ijazah nasionalnya yang dikenal dengan istilah PIN (Penomoran

Ijazah Nasional).

- Orang Tua. Orang Tua juga perlu secara rutin memperhatikan data anaknya yang sedang kuliah di sebuah Perguruan Tinggi untuk memastikan apakah anaknya resmi terlapor ke Pemerintah atau tidak. Sekaligus menjadi bahan kroscek Orang Tua apakah Anaknya aktif kuliah tiap semester atau tidak, selain itu juga dapat menjadi kroscek Orang Tua apakah Perguruan Tinggi tempat anaknya kuliah saat ini termasuk Perguruan Tinggi yang taat pada Pemerintah atau tidak.

- Perusahaan/ Instansi calon pengguna Alumni. Instansi/ Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dapat melakukan pengecekan terkait keabsahan calon pekerja yang melamar apakah benar-benar lulusan dari sebuah Perguruan Tinggi dengan cara melakukan pengecekan data calon pelamar tersebut melalui halaman web PDDikti yang dapat diakses



secara publik.

- Alumni Perguruan Tinggi. Alumni dapat juga mengecek apakah selama menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut data-data transaksi kegiatan akademiknya memang terlaporkan ke Pemerintah dengan tertib atau tidak.

Diatas adalah beberapa contoh ilustrasi bagaimana Masyarakat membutuhkan data-data di PDDikti untuk masing-masing kebutuhannya, sehingga dibutuhkan kepedulian Masyarakat untuk melakukan pengecekan data-data di PDDikti secara mandiri dan rutin agar data-data Mahasiswa, Anaknya yang sedang kuliah, Alumni yang sudah selesai, Perusahaan pengguna Alumni selalu tertib dilaporkan oleh Perguruan Tingginya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.